

**KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PEMBINAAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Studi Pada Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Rico Fritz Dannerd S.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE COORDINATION AMONG RELATED STAKEHOLDERS IN THE COACHING OF PEOPLE WITH SOCIAL WELFARE PROBLEMS

(A Study on Handling of Street Children, Homeless People, and Beggars in Bandar Lampung)

By

Rico Fritz Dannerd S.

The coordination in the coaching of street children, homeless people, and beggars has been done by related stakeholders based on the local regulation number 3/2010 on the coaching of street children, homeless, and beggars, included: the Social Service of Bandar Lampung, Public Orders Enforcers of Bandar Lampung, Sinar Jati Lampung Agency, and Social Welfare Institutions Amanah Educator Insan Kamil Lampung. The coordination was done because there was an increasing number of street children, homeless people and beggars in the city of Bandar Lampung.

The purpose of this research is to identify the coordination of related stakeholders and to find out the obstacles in the coaching of street children, homeless people and beggars in Bandar Lampung. The method used in this research was qualitative approach. The data collection technique was completed through interviews, observation and documentation.

The coordination among the related stakeholders in the coaching of street children, homeless people and beggars in Bandar Lampung could be seen through seven coordination indicators: information, communication and information technology, awareness of importance of coordination, participant competence, agreement and commitment, agreement determination, coordination incentive and feedback. Based on these indicators, it revealed that the coordination carried out in coaching street children, homeless people, and beggars in the city of Bandar Lampung was not running well. This was due to five of those indicators have not been well implemented and also there were obstacles during the coaching, included: lack of human resources, rare coordination evaluation meetings and inadequate number of infrastructures. The researchers recommendation, included: making written regulations, adding the human resources, providing rewards and punishment to the coordination teams, and create a coordination meeting schedule.

Keywords: coordination, stakeholders, people with social welfare problems

ABSTRAK

KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PEMBINAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi pada Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung)

Oleh

Rico Fritz Dannerd S.

Koordinasi dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Yayasan Sinar Jati Lampung, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Pendidik Insan Kamil Lampung. Koordinasi dilakukan karena permasalahan banyaknya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi antar *stakeholder* dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung dapat dilihat melalui tujuh indikator koordinasi, yaitu: informasi, komunikasi, dan teknologi informasi; kesadaran pentingnya koordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan dan komitmen; penetapan kesepakatan; insentif koordinasi; dan *feedback*. Berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung belum baik. Hal tersebut dikarenakan dari tujuh indikator, lima diantaranya belum bisa dilaksanakan dengan baik dan juga terdapat kendala dalam pembinaan, yaitu kurangnya sumber daya manusia, rapat evaluasi koordinasi yang jarang dilakukan, dan kurangnya sarana dan prasarana. Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu membuat aturan tertulis, penambahan sumber daya manusia, memberikan *reward* dan *punishment* kepada pelaksana koordinasi, dan membuat jadwal rapat koordinasi.

Kata Kunci: Koordinasi, *Stakeholder*, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

**KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PEMBINAAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Studi Pada Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Rico Fritz Dannerd S.

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER
DALAM PEMBINAAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Studi Pada Penanganan Anak Jalanan,
Gelandangan, dan Pengemis di Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Rico Fritz Dannerd S.

Nomor Pokok Mahasiswa : 1316041061

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP 19710122 199512 2 001

Selvi Diana Mellinda, S.A.N., M.P.A.
NIP

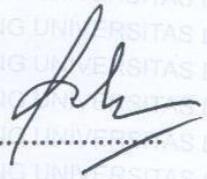
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

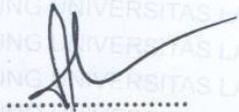
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.



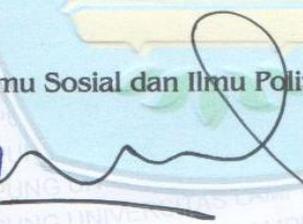
Penguji Utama : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Agustus 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,



Rico Fritz Dannerd S.

NPM. 1316041061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rico Fritz Dannerd Sinurat, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak S. Sinurat dan Ibu Vera M. Nababan. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 11 Oktober 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di TK Xaverius 3 Way Halim, Bandar Lampung (2000-2001), SD Xaverius 3 Bandar Lampung (2001-2007), SMP Xaverius 4 Bandar Lampung (2007-2010), SMA Fransiskus Bandar Lampung (2010-2013), dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2013.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan baik internal maupun eksternal. Dalam internal kampus penulis merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA), Pengurus di Divisi Hubungan Masyarakat Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung periode 2015. Dalam lingkup eksternal, penulis aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Cabang Bandar Lampung, dan menjabat sebagai

Sekretaris Fungsi Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandar Lampung periode 2014-2016. Saat ini penulis dipercayakan sebagai Pengurus *Caretaker* Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Lampung. Selain itu, penulis pernah dipercayakan sebagai tim entry data Sidalih di KPU Kota Bandar Lampung. Di akhir perkuliahan, penulis berkesempatan bergabung di Komunitas 1000 Guru Provinsi Lampung.

Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis berpartisipasi aktif dalam berbagai pelatihan maupun kegiatan lokal dan nasional. Penulis juga tercatat telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Kekatang, Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran .

MOTTO

*Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-
Nyalah harapanku*
(Markus 5:36)

*“Jangan takut jatuh dan terantuk, dengan terbentur kau
akan terbentuk”*
(Najwa Shihab)

*“Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi
hebat dalam tindakan”*
(Confusius)

Ut Omnes Unum Sint
-Agar Semua Satu Adanya-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus

Ku persembahkan karya sederhanaku ini untuk:

Bapak, Mama, dan Adikku tercinta

Yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan doa dalam menanti keberhasilanku

Keluarga besarku, sahabat, teman-temanku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepadaku

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Koordinasi Antar *Stakeholder* Dalam Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali bantuan, duukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran juga memberikan pengarahan dan saran kepada saya dalam penyusunan skripsi ini
2. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P. selaku dosen pembahas sekaligus penguji penulis yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Noverman Duadji, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, pengarahan, saran, serta bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan, semoga dapat menjadi bekal yang berharga.
9. Ibu nur'aini sebagai staff jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dan membantu penulis terkait administrasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
10. Teristimewa untuk mama dan bapak, S. Sinurat dan Vera M. Nababan, orangtua luarbiasa bagiku. Terimakasih untuk setiap perjuangan, dukungan, didikan, kasih sayang, dan doa demi keberhasilanku. Maaf bila terkadang selama kuliah pernah mengecewakan kalian. Setelah selesainya pendidikanku di perkuliahan ini, semoga ini menjadi langkah awal untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Sehat-sehat dan panjang umur ya bapak dan mamak, aku ingin membahagiakan kalian. Tuhan Yesus memberkati kita.
11. Terimakasih juga untuk adikku, Agnes Shntya Rosalinda Sinurat. Terimakasih untuk setiap bantuan,ndukungan, dan doa yang tiada hentinya bagi abang. Semangat untuk lembaran barumu di bangku perkuliahan, gali terus ilmu dan pengetahuan agar kelak dirimu menjadi sukses dan bisa membahagiakan mama dan bapak serta orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati.
12. Terimakasih juga untuk Tulang yang kupanggil dengan sapaan akrab "Paman Gendut". Terimakasih paman untuk setiap dukungan, motivasi, saran, dan masukan yang paman berikan sejak aku sekolah hingga menyelesaikan kuliah. Doakan selalu paman untukku yang akan memulai langkah baru kedepannya. Sehat dan panjang umur ya paman. Tuhan Yesus memberkati.

13. Seluruh informan, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja, Yayasan Sinar Jati Lampung, dan LKS APIK Lampung terimakasih atas bantuan, informasi dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Untuk teman-teman “Alasmegara” Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013, terkhusus Galih, Ghozie, Pindo, Zikri, Yoga, Respaty, Dimas, Hendro, Zulham, Revardo, Hasby, Yogi, Devi Yona Sinaga, Dita Meinurisa, Ayu Kartika, Kessy, Artha, Agnes Wahyu, Devi Permata Sari, dan rekan-rekan ALASMENARA yang lainnya. Terimakasih untuk cerita dan kebersamaannya, serta bantuan selama ini. Sukses untuk kita semua.
15. Teman-teman KKN Kekatang, Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Bang Novel, Panji, Komang, Stevia P, Felicia Helga yang telah menjadi keluarga baru selama dua bulan. Terimakasih untuk kebersamaannya selama KKN. Sukses untuk kita semua. God bless.
16. Untuk Keluarga Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandar Lampung. Bang Andreasa Harianja, Bang Frans, Bang Bram, Bang Melky Sandro, Bang Janter, Bang Doni Sinaga, Bang Rido Sihaloho, Bang Alfian, Bang Mori, Bang Pindo, Bang Ferry. Terimakasih untuk setiap cerita, diskusi, motivasi, dan setiap kegiatan yang pernah dilalui bersama. Sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
17. Terkhusus untuk teman-teman seperjuanganku pada saat menjadi Badan Pengurus Cabang GMKI Bandar Lampung periode 2014-2016. Bang David, Bang Romario, Bang Yonathan, Kak Novelin, Biaton, Roni, Dewi Hany, Rachel, Yunita, Ester, Erland, Sumurung, dan Derick. Terimakasih untuk setiap proses dan dinamika yang kita lalui bersama. Semoga kelak apa yang kita lakukan selama berproses akan menghasilkan buah-buah yang manis di kehidupan kita masing-masing.
18. Untuk adik-adikku dan rekan-rekan se-pergerakan di GMKI Cabang Bandar Lampung. Apriadi, Candra, Darwin, Desy, Devi Yuliani, Doklay, Eka Rahayu, Elsaday, Eva Esterina, Evelyne, Astry, Gerpan, Gio, Juli, Lamria, Marthalena, Nadia, Stevanus, Timoti, Johannes, Jupiter, Kornel, Maria Fransiska, Melisa, Mikha, Melky Nababan, Nandus Immanuel,

Naomi, Christian Sitanggang, Nico, Nia, Sari, Ricky, Agrin, Ute, ziko, Ranto, dan semuanya yang tidak dapat ditulis satu-persatu, terimakasih untuk setiap proses, diskusi, dorongan, motivasi yang pernah dilalui. Jangan pernah berhenti untuk berproses, yakinlah proses tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Ut Omnes Unum Sint. Tuhan Yesus Sang Kepala Gerakan memberkati kita semua.

19. Untuk UKM Kristen Universitas Lampung, terkhusus pengurus Periode 2015. Bang Alex Simatupang, Kak Debora, Yolanda, Sumurung, Biner, Bang Nando, Lusy, Astry Rumahorbo, Dorlan Evi, Juliana Marbun, Boby Barasa, Wafernanda, Edo Lubis, Kak Rosana, Ribka, bangkit, Lika Sitoru dan teman-teman lainnya yang tidak dapat ditulis satu-persatu. Terimakasih untuk semangat, pelajaran yang telah diberikan selama berpelayanan dan berorganisasi di kampus. Sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati.
20. Untuk Bang Juvent R. Pakpahan selaku senior, rekan se-pergerakan, dan abang terbaik. Terimakasih bang untuk wawasan, ilmu, pengetahuan, motivasi, saran, dan masukan yang abang berikan di setiap momen kita berdiskusi sembari ngopi dirumah. Banyak hal-hal yang aku belum tau, jadi tau semenjak kita sering berdiskusi. Menjadi diri sendiri, tulus, memperbaharui kapasitas diri, itu yang menjadi pelajaran bermakna yang abang berikan. Jangan pernah bosan untuk selalu berbagi ilmu kepada ku ya bang. Sukses selalu buatmu bang juv. Tuhan Yesus memberkati.
21. Untuk Pasukkan Huru-Hara (PHH) dan Geng Warung Emak Katab. Bang Bulbul (Terimakasih untuk pemahaman terkait tarombo batak yang sering kau diskusikan bang.), Alex Manurung (orang batak yang piil, haha) Adi Nick (semangat kuliahmu, jangan hanya berproses di fisip aja), Bang Alex Togatorop (kapan kita makan ayam' mu bang? Hahaha), Chrisan Natasya (titip adekku di FH ya ICHAN, haha), Cindy Sinurat (dunkin lagi kita, to? Hahaha) , Emes (sukses kuliahmu mes), Derick (gimana sektif terkait nyambut adek-adek kita di fisip nanti? Hahaha) , Martin Pasaribu (kurang-kurangnya tipu-tipu itu tin, haha), Nia Munthe (senang aku liatmu bahagia naik gunung dek), Bang Riki Moan (sukses untuk kuliahmu, bang), Lae

Parasian (cepat nikah kau lang haha), Sangga Sijabat (kurang-kurangi hidup yang sesukamu itu sangga, haha), Sintong Sitinjak (terimakasih bre udah menjadi tempat bertukar pikiran untuk hal-hal yang progresif), Sumurung Nadeak (terimakasih le untuk cerita dan pengalam selama perkuliahan, berawal dari kepanitiaan Natal hingga satu kepengurusan di UKM Kristen dan GMKI Bandar Lampung. Sukses untuk kita le), Tunggul Van Roy (Trims dek Roy yang selalu care terhadap abangmu ini dan yang selalu memberikan tips-tips dalam PDKT. Haha. Sukses roy!), Wenny (ingat 4 tahun ya, kemaren kan udah itung-itungan kita bere, semangat), Yunita Manurung (semakin baik perubahanmu iban), Vania Silalahi (trims itokku yang selalu ada buatku, sukses untuk kita ya), Samuel Nainggolan (Teman dari SD, hingga perkuliahan dan Oteman setia bermain pes di kala penat. Sukses untuk kita ya sam!), Bang Daniel Simbolon (tempat tukar pikiran dalam melakukan bisnis, terutama sepatu, haha. Semangat skripsi nya bang), Roni Simanullang (trims untuk kosanmu yang sering dipake rame dengan abang-abang), Yolanda Silaen (hallo itok, 4 tahun sudah ya tok. Terimakasih untuk cerita dan pengalaman yang kita lalui selama perkuliahan, semoga selalu terkenang hingga selamanya. Sukses untuk kita ya tok)), Anita Sagala (cepat gemuk anita haha, sukses kuliahnya ya), dan Fajar Lubis (jar, pulang kau kerumah. Mulai pikirin judul itu. Jangan hanya main aja kau pikirin). Terimakasih banyak untuk kalian semua yang telah hadir di masa perkuliahan. Terimakasih telah menjadi kawan-kawan berbagi cerita, saling memotivasi, saling berdebat dikantin, tukar pikiran, saling memberikan masukan dan dorongan, saling berbagi info tentang boru ni raja, dan saling membuat lelucon. Semua berawal dari kantin emak (tempat kumpulnya mahasiswa batak), semoga kita sukses kedepannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.

22. Teruntuk Emak yang punya Kantin Batak. Terimakasih emak telah menyediakan kantin yang nyaman untuk makan sekaligus tempat untuk diskusi, tertawa, bercanda bagi saya dan kawan-kawan batak yang lainnya selama hampir 4 tahun ini. Maaf jika terkadang saya dan teman-teman

lainnya sering menjadi pelanggan terakhir sehingga terkadang membuat emak marah. Semoga kantinnya lancar terus.

23. Teruntuk mahasiswa baru FISIP 2017 yang sering ke kantik emak. Devi Elisha, Juli, Lestari, dan Yolanda. Terimakasih untuk setiap moment yang telah terjadi di kantin maupun diluar. Kurang-kuragin bercandaan yang nganar, coba mulai pikirkan untuk hal yang serius kedepannya. Tetap lanjutkan perjuangan untuk meramaikan kantin emak. Semangat kuliahnya. Tuhan memberkati kalian.
24. Untuk Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 31 Juli 2017

Rico Fritz Dannerd S.
NPM. 1316041061

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Manajemen	10
1. Pengertian Manajemen	10
2. Fungsi Manajemen	11
B. Tinjauan Koordinasi.....	12
1. Pengertian Koordinasi	12
2. Ciri-Ciri Koordinasi	13
3. Tujuan Koordinasi	14
4. Bentuk Koordinasi.....	15
5. Indikator Koordinasi	17
6. Syarat-Syarat Koordinasi	18
7. Teknik Koordinasi.....	21
C. Tinjauan <i>Stakeholder</i>	23
1. Pengertian <i>Stakeholder</i>	23
2. Tujuan dan Sarana <i>Stakeholder</i>	24
3. Ciri-Ciri <i>Stakeholder</i>	25
4. Kategori <i>Stakeholder</i>	25
D. Tinjauan Pembinaan.....	26
1. Pengertian Pembinaan	26
2. Faktor Pembinaan.....	27
E. Tinjauan Organisasi	27
1. Pengertian Organisasi.....	27
2. Ciri-Ciri dan Unsur Organisasi	28
F. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Keabsahan Data	41

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	43
1. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung	43
2. Tingkat Kemiskinan Kota Bandar Lampung	44
3. Kondisi Anjal dan Gepeng di Kota Bandar Lampung	46
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	48
1. Sejarah Pembentukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	48
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	49
3. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	49
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	50
C. Gambaran Umum Satpol PP Kota Bandar Lampung	53
1. Kedudukan	54
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Bandar Lampung	54
3. Visi dan Misi Satpol PP Kota Bandar Lampung	55
D. Gambaran Umum LKS APIK Lampung	56
1. Profil LKS APIK Lampung	56
2. Visi dan Misi LKS APIK Lampung	57
3. Maksud dan Tujuan LKS APIK Lampung	57
4. Struktur Organisasi	58
E. Gambaran Umum Yayasan Sinar Jati Lampung	59
1. Sejarah Singkat Yayasan Sinar Jati Lampung	59
2. Tujuan Yayasan Sinar Jati Lampung	60
3. Visi dan Misi Yayasan Sinar Jati Lampung	60
4. Struktur Organisasi	61

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	62
1. Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung	62
2. Faktor-Faktor Kendala Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung	97
B. Pembahasan	99
1. Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung	99
2. Faktor-Faktor Kendala Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung	115

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung sejak tahun 2010-2015	3
2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Kota Bandar Lampung .	4
3. Data Informan	36
4. Dokumen Penelitian.....	37
5. Data PMKS Kota Bandar Lampung	45
6. Data Anjal dan Gepeng tahun 2010-2015	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembinaan PMKS terutama Anjal dan Gepeng.....	31
2. Personil Satpol PP Kota Bandar Lampung.....	81
3. Pelatihan Anjal dan Gepeng di LKS APIK Lampung.....	86
4. Pengemis di JPO R.A.Kartini.....	95
5. Gelandangan di JPO Raden Intan.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat di negara manapun. Kemiskinan umumnya ditandai dengan ketimpangan suatu kesenjangan, antara lain kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, keterampilan dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang.

Jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada bulan Maret 2013 berjumlah 28,07 juta jiwa menjadi 28,28 juta jiwa pada Maret 2014, kemudian pada Maret 2016 mengalami penurunan menjadi 28,15 juta jiwa. (Sumber: *www.bps.go.id*, diakses tanggal 28 Desember 2016). Jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan yang sangat tipis yaitu sekitar 1,75 persen, bahkan hal ini masih tidak stabil dan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat adanya kemiskinan adalah munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal inilah yang menjadikan kemiskinan sebagai masalah sosial yang cukup menjadi perhatian dan disinilah peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sangat dibutuhkan oleh PMKS, terutama anak jalanan, gelandangan,

dan pengemis. Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dikarenakan dampak negatif dari pembangunan, karena pembangunan yang mensejahterakan rakyat terjadi secara tidak merata. Selain itu masalah maraknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan (Sumber: *radarlampung.co.id*, diakses tanggal 28 Desember 2016).

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang krusial dan menjadi masalah sosial di kota besar maupun kota kecil. Hal ini karena kemiskinan yang menjadi penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang belum berhasil dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Berbagai variabel fundamental yang memengaruhi peningkatan jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di perkotaan seperti kemiskinan, besarnya urbanisasi karena ketimpangan pembangunan kota dengan desa, kualitas sumber daya manusia yang rendah, angkatan kerja yang tidak terampil, keterbatasan daya serap angkatan kerja di sektor formal, tingginya angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD), dan etos kerja yang rendah, belum berhasil diatasi. Sehingga anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terus meningkat dan merupakan fenomena kemiskinan kota.

Salah satu kota yang memiliki masalah sosial terutama kemiskinan adalah Kota Bandar Lampung. Masalah tersebut menimbulkan adanya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta menjadi pemandangan di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, jumlah angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup drastis,

dimana pada tahun 2010 mencapai angka 318.458 jiwa sedangkan di tahun 2013 mencapai angka 429.146 jiwa. Angka kemiskinan mengalami kenaikan juga pada tahun 2014 mencapai angka 450.014 jiwa, kemudian di tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 476.055 jiwa (Sumber: *bandarlampungkota.bps.go.id*, yang diakses tanggal 10 November 2016).

Surat kabar online Lampung Post Edisi 29 April 2015 memberitakan bahwa Dinas Sosial Bandar Lampung kesulitan membenahi persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung. Apalagi hingga kini, Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memiliki panti rehabilitasi bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Akibatnya meski Dinas Sosial dibantu dengan Satpol PP menertibkan, tetap saja jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak berkurang. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung Sejak Tahun 2010-2015.

Tahun	Jumlah			Total
	Anak Jalanan	Gelandangan	Pengemis	
2010	89	35	83	207 orang
2011	70	15	103	188 orang
2012	68	20	103	191 orang
2013	45	25	83	153 orang
2014	72	20	97	181 orang
2015	72	20	97	181 orang

Sumber : Dokumen Dinas Sosial Provinsi Lampung (2016)

Berdasarkan jumlah data yang dihimpun dari Dinas Sosial Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2011 jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis menurun dari 207 orang menjadi 188 orang. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali menjadi 191 orang dan menurun pada

tahun 2013 menjadi 153 orang. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 181 orang. Dari jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari tahun 2010 hingga tahun 2015 yang bersifat tidak stabil, menandakan masalah sosial ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk lebih efektif lagi dalam penanganan PMKS terkhusus anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini memiliki dampak negatif, seperti munculnya ketidaksetaraan sosial, yang ditandai dengan ketidaktertiban, ketidaknyamanan, serta mengganggu keindahan kota.

Maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Bandar Lampung membuat Dinas Sosial melakukan tiga tahap yaitu monitoring langsung ke lapangan dan mengadakan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Kepala Bidang Pelayanan Rehab Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Muzarin Daud mengatakan persoalan anak jalanan, gelandang, dan pegemis merupakan permasalahan yang dinamis dan fleksibel. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah membereskan, tetapi datang lagi yang baru. (Sumber: *saibumi.com yang diakses tanggal 10 November 2016*). Hal ini bisa dibuktikan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Kota Bandar Lampung Tahun 2015

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1.	balita terlantar	189 Jiwa
2.	Anak terlantar	284 Jiwa
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	31 Jiwa
4.	Anak jalanan	72 Jiwa

5.	Anak yang menjadi korban kekerasan	7 Jiwa
6.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	18 Jiwa
7.	Gepeng dan pemulung	374 Jiwa

Sumber : Dokumen Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (2016)

Permasalahan banyaknya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini membuat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung yang kemudian diberikan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana peraturan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai larangan dan ketentuan-ketentuan yang berisi setiap orang atau anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilarang mengemis, mengamen, atau menggelandang di tempat umum dan jalanan. Selanjutnya, setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan, dan kelancaran pengguna fasilitas umum. Kemudian, pelanggaran atas peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interograsi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan, serta dalam Perda tersebut tertuang bahwa setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberikan uang dan barang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan

lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan. Namun setelah Peraturan daerah dikeluarkan dan diimplementasikan, hasilnya masih belum maksimal, hal tersebut terbukti dari tahun 2010 sampai dengan 2014 Dinas Sosial Provinsi Lampung mencatat jumlah Anak Jalanan (anjali), gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung belum berkurang.

Permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis perlu diperhatikan agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang serupa maka diperlukan upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga terkait yang memiliki konsentrasi di bidang masalah sosial. Pihak-pihak tersebut dituntut peran sertanya dalam mendukung penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Upaya tersebut dirasa perlu agar angka anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Provinsi Lampung bisa berkurang. Sehingga untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung yang bebas dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, diperlukan koordinasi dari para *stakeholder*.

Stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan/ atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil. Pada penanganan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja, LKS APIK, dan Yayasan Sinar Jati Lampung, namun tidak menutup kemungkinan terdapat lembaga swasta lain yang turut membantu dalam

penanganan PMKS di Bandar Lampung melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Masing-masing *stakeholder* tersebut memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan tugas mereka dalam melaksanakan penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Satpol PP berperan sebagai pelaksana penertiban anjal dan gepeng, selanjutnya Dinas Sosial berperan dalam monitoring di lapangan dan mengadakan pembinaan terhadap anjal dan gepeng, kemudian LKS APIK memiliki peran dalam pemberdayaan anjal dan gepeng dalam bentuk program usaha kemandirian, serta Yayasan Sinar Jati berperan dalam merehabilitasi anjal dan gepeng agar dapat bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya dalam pemenuhan hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis diperlukan adanya peran dari semua *stakeholder* dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintah secara bersama dan saling berkoordinasi.

Melihat dari tingginya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung, diindikasikan bahwa koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan PMKS terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum dijalankan dengan baik. Berangkat dari permasalahan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung, maka koordinasi antar *stakeholder* mempunyai arti penting dan pada akhirnya pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tersebut ditentukan oleh kerjasama yang baik antar instansi yang terlibat. Menurut Djamin dalam Hasibuan (2011:86), koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan program dan berperan sangat vital sehingga terdapat saling mengisi, membantu,

dan melengkapi. Artinya tanpa adanya koordinasi yang baik antar *stakeholder*, maka pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak terarah dalam satu kesatuan tindakan sehingga jumlah PMKS terutama anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak dapat berkurang. Menyadari adanya permasalahan tentang anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan PMKS khususnya penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan PMKS khususnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung ?
2. Apa saja kendala koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan PMKS khususnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan koordinasi antar *stakeholder* dalam PMKS khususnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Bandar Lampung
2. Mengidentifikasi kendala-kendala koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan PMKS khususnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu administrasi negara, terutama dalam gambaran koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen menurut Terry dalam Syamsi (1994:59) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian, yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, manajemen menurut Hasibuan (2011:2) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Stoner dalam Badrudin (2013:3), manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian manajemen oleh beberapa ahli tersebut, maka manajemen merupakan kegiatan pimpinan dengan menggunakan segala sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, yang dimana tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen

Sedangkan menurut Fayol dalam Badrudin (2013:15) fungsi manajemen terdiri dari:

a. *Planning* (Perencanaan)

Pembatasan yang kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa penetapan harus dicapai. Dalam perencanaan disusun dan ditetapkan *budgeting*. Oleh karena itu lebih tepat *planning* dirumuskan sebagai penetapan tujuan, *policy*, prosedur, *budget*, dan program dari suatu organisasi.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

c. *Commanding*

Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan.

d. *Coordinating* (Koordinasi)

Coordinating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha tersebut antara lain memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* serta teguran.

e. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula.

Dari beberapa pendapat ahli tentang fungsi manajemen, salah satu fungsi manajemen yang akan dikupas dalam penelitian ini adalah koordinasi. Koordinasi dalam organisasi maupun antar organisasi itu sangat penting karena tanpa adanya koordinasi dalam suatu organisasi tidak akan tercapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien serta tidak adanya kerjasama yang baik.

B. Tinjauan Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut Terry dalam Syaffie (2006:86) adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin, dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Syamsi (1994:113) koordinasi merupakan tugas pimpinan yang dilakukan dengan

mengusahakan agar semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Djamin dalam Hasibuan (2011:86) bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Berdasarkan pendapat ahli yang menyebutkan pengertian koordinasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha maupun kerjasama individu antar individu, organisasi antar organisasi, badan antar badan, atau instansi antar instansi untuk memadukan dan menyederhanakan dalam pelaksanaan tugas-tugas guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

2. Ciri-Ciri Koordinasi

Ciri-ciri koordinasi menurut Handayadiningrat (1986:118), yaitu:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pada pimpinan. dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi

- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama
- e. Konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja

3. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi menurut Ndraha (2015:295), yaitu:

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi sehingga mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mungkin semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Sedangkan menurut Hasibuan (2011:87) tujuan koordinasi antara lain:

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran

Berdasarkan pendapat ahli tentang tujuan koordinasi dapat disimpulkan bahwa tujuan koordinasi antar organisasi pada akhirnya menciptakan kegiatan yang efisien, bersinergi, dan memiliki peluang untuk berhasil.

4. Bentuk Koordinasi

Menurut Syamsi (1994:115), bentuk koordinasi adalah:

- a. Koordinasi Vertikal

Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan kepada para bawahannya. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan kegiatan-kegiatan dalam unit kerja yang bersangkutan dapat tercapai dengan efisien. Contohnya kepala biro mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan para kepala bagian yang berada di bawah bironya.

- b. Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah koordinasi yang dilakukan dalam unit-unit yang sederajat atau antar-instansi yang sederajat. Misalnya di BPD, koordinasi dari para kepala biro mengenai suatu kegiatan yang harus dilakukan dengan melibatkan beberapa biro. Salah satu kepala biro yang paling berkepentingan diangkat sebagai koordinatornya. Ini sangat penting, karena sasaran BPD

dapat dicapai dengan baik apabila antara bidang-bidang operasional dan bidang-bidang penunjangnya tercipta kerja sama yang harmonis, dan saling memacu.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi diagonal dapat terjadi dalam organisasi yang pengelolaan bidangnya atau fungsinya secara sentralisasi. Misalnya informasi dipusatkan pada satu unit tersendiri agar informasi tidak simpang siur. Juga misalnya pengetikan dipusatkan pada satu unit pengetikan tersendiri.

Sedangkan menurut Wursanto (2005:251) bentuk koordinasi dibedakan menjadi dua macam, antara lain:

- a. Koordinasi vertikal, adalah tindakan atau kegiatan penyatuan/pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit/satuan-satuan kerja yang langsung ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya
- b. Koordinasi horizontal, dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Koordinasi *interdisciplinary*, adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan/menyatukan tindakan untuk mewujudkan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain, secara internal maupun secara eksternal pada unit-unit yang mempunyai tugas yang sama.
 - 2) Koordinasi *interrelated*, adalah koordinasi antar badan, instansi/lembaga yang fungsinya satu sama lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan teori diatas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara Dinas Sosial Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, LKS APIK Provinsi

Lampung, dan Yayasan Sinar Jati Provinsi Lampung dalam pembinaan anjal dan gepeng termasuk koordinasi *interrelated* karena instansi tersebut mempunyai fungsi yang sama dan saling berkaitan dalam pembinaan anjal dan gepeng.

5. Indikator Koordinasi

Menurut Syamsi (1994:116), koordinasi yang dapat di lihat dari hal-hal berikut:

- a. Terdapat pembagian yang tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi
- b. Terbentuknya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam organisasi
- c. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup diantara orang-orang dalam organisasi
- d. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan perencanaan, pembimbingan dan pengendalian

Sedangkan menurut Ndraha (2015:297), koordinasi dapat diukur melalui indikator:

- a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
- b. Kesadaran pentingnya koordinasi
- c. Kompetensi partisipan, meliputi: ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat dan ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
- d. Kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan dan komitmen harus digandakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal)
- e. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi
- f. Insentif koordinasi, yaitu sanksi pihak yang ingkar atau tidak mentaati kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan sendiri.

- g. *Feedback* sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

Berdasarkan pendapat tentang indikator koordinasi, maka dalam penelitian menggunakan indikator koordinasi menurut Ndraha sebagai fokus penelitian. Ketujuh indikator tersebut digunakan untuk melihat seperti apa koordinasi yang berjalan selama ini antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, LKS APIK Lampung, dan Yayasan Sinar Jati Lampung dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Koordinasi antar instansi tersebut dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tujuh indikator koordinasi yang diantaranya adalah komunikasi.

6. Syarat-Syarat Koordinasi

Syarat-syarat koordinasi menurut Hasibuan (2011:88), diantaranya:

- a. *Sense of Cooperation* atau perasaan untuk bekerja sama ini harus dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang
- b. Rivalri, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan
- c. *Team Spiri*, artinya satu sama lain pada tiap bagian harga menghargai
- d. *Espirit de Corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan bersemangat.

Sedangkan menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (2006:39), ada 9 syarat mencapai koordinasi, yaitu:

- a. Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan, dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan dan cara ini jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

b. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai dengan mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri hanya ada dalam konsultasi bersama.

c. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama perusahaan berfungsi.

d. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik akan mengetahui masalah secara dini dan mencegah kejadiannya.

e. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberi tahu tentang

tujuan permasalahan dan diminta agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan.

f. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Menurut Robbins struktur organisasi adalah pengakuan sebuah organisasi mengenai kebutuhan untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pola-pola interaksi para anggotanya secara formal. Struktur organisasi bisa diisi oleh orang-orang yang berperan penting dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi memberikan gambaran pemisah kegiatan antara satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas dan fungsi yang telah dibatasi.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab

Wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan dengan kesatuan tujuan.

h. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang.

i. Kepemimpinan yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkatan pelaksanaan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa syarat koordinasi ini sangat penting untuk dapat tercapainya koordinasi yang baik, karena dengan adanya syarat tersebut dapat menjadi acuan bagi organisasi untuk mencapai pelaksanaan program dan tujuan yang ingin dicapai lewat koordinasi, seperti hubungan baik, tujuan yang jelas menjadi acuan untuk bisa menuju koordinasi organisasi yang baik.

7. Teknik Koordinasi

Mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam organisasi diperlukan teknik-teknik tertentu. Pemahaman terhadap teknik-teknik, koordinasi sangat diperlukan oleh para koordinator atau manajer karena dengan mengetahui teknik-teknik koordinasi kemungkinan besar akan dapat dicapai hasil yang optimal, efisien, dan efektif. Teknik-teknik koordinasi menurut Handyaningrat (1986:124), antara lain:

a. Koordinasi melalui kewenangan

Penggunaan wewenang merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal yang demikian apabila organisasi tersebut bersifat seragam (homogen) atau yang disebut *integrated type*. Dalam organisasi yang demikian itu, koordinasi melalui kewenangan dapat dijalankan secara efektif.

b. Koordinasi melalui konsensus

Koordinasi melalui konsensus terbagi menjadi 3 macam yaitu: konsensus melalui motivasi, konsensus melalui sistem timbal balik, dan konsensus melalui ide. Para ahli berpendapat bahwa motivasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan usaha-usaha koordinasi, terutama

dalam organisasi besar dan kompleks. Selanjutnya konsensus melalui timbal balik atau saling membantu dapat digunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi. Sedangkan konsensus melalui ide dimaksudkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.

c. Koordinasi melalui pedoman kerja

Pedoman kerja dijadikan landasan berpijak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan dapat terselenggaranya koordinasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Pedoman kerja atau petunjuk kerja merupakan sarana pengikat dan pengaruh berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

d. Koordinasi melalui forum

Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.

e. Koordinasi melalui konperensi

Koordinasi melalui konperensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan maupun pada tingkat pelaksana. Rapat-rapat pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam

pelaksanaan, akan tetapi dipergunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi.

C. Tinjauan *Stakeholder*

1. Pengertian *Stakeholder*

Menurut Freedman dalam Saharuddin (2013:233) *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Budimanta dkk dalam Saharuddin (2013:233) mengungkapkan bahwa *stakeholder* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program.

Para pemangku kepentingan di sebuah institusi manapun memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungan institusi ataupun lembaga. Munawaroh (2016:32) menyebutkan bahwa para pemangku kepentingan itu lebih sering disebut dengan *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, *stake* dan *holder*. Secara umum, kata *stakeholder* dapat diterjemahkan dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan penjabaran diatas, secara garis besar konsep *stakeholder* sebagai individu atau organisasi baik profit maupun non profit yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, *stakeholder* semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, disimpulkan bahwa stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal serta memiliki kepentingan dan kemampuan untuk mempengaruhi hasil.

2. Tujuan dan Sasaran *Stakeholder*

a. Tujuan

- 1) Kepentingan *stakeholders* terwujud dalam pengelolaan kawasan melalui kemitraan.
- 2) *Stakeholder* mampu berperan secara optimal dalam setiap tahapan proses pengelolaan kawasan.
- 3) Para pihak memperoleh manfaat ekonomi, teknologi maupun informasi, sesuai peran dan tanggung jawab yang dilakukan.
- 4) Usaha-usaha ekonomi dikembangkan untuk mendukung kelangsungan mata pencaharian masyarakat setempat.
- 5) Kawasan dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

b. Sasaran

- 1) Kepentingan stakeholder tertuang dalam perencanaan strategis dan rencana operasional.
- 2) *Stakeholder* terorganisir dalam organisasi kemitraan dan secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan.
- 3) Hasil-hasil yang dicapai didistribusikan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dilakukan.

3. Ciri-ciri *Stakeholder*

Terdapat 3 (tiga) ciri utama *stakeholder*, yaitu:

- a. Merupakan orang atau individu yang penting dalam mencapai kejayaan organisasi.
- b. Hubungan mereka dengan perbadanan atau organisasi membolehkan mereka mendapat faedah dari pada tindakan dan operasi perbadanan itu.
- c. Membolehkan hubungan diantara stakeholder dengan organisasi dengan membuatkan sebuah perbadanan itu mustahil untuk mengambil kesempatan dan melanggar hak-hak mereka.

4. Kategori *Stakeholder*

Menurut Jones dalam Selviyanna (2012:44) *stakeholder* dapat diklarifikasi kedalam dua kategori, yaitu:

- a. *Inside Stakeholder*, terdiri dari pihak yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumberdaya perusahaan secara berbeda didalam organisasi perusahaan, seperti pemegang saham, para *manager*, dan karyawan.
- b. *Outside Stakeholder*, terdiri dari orang-orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pola karyawan perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pelanggan, *costumers*, pemasok, pemerintah (*government*), masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum (*general public*).

Berdasarkan pendapat ahli yang menyebutkan kategori *stakeholder* sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* dalam penelitian ini termasuk kedalam kategori *outside stakeholder*, karena *stakeholder-stakeholder* yang berkoordinasi dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terdiri dari orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan.

D. Tinjauan Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut Syadam dalam Nulhaqim (2008:157) merupakan pembaharuan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Kemudian menurut Soegiyono dalam Nulhaqim (2008:157) pembinaan adalah berbagai macam upaya peningkatan kemampuan sehingga mampu mandiri. Sedangkan, menurut Hidayat (1979:10) bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu

mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

2. Faktor Pembinaan

Menurut Bartal (1976:7), pembinaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

1. Faktor situasional, yang meliputi: kehadiran orang lain, faktor lingkungan dan kebisingan, faktor tanggung jawab, faktor kemampuan yang dimiliki, faktor desakan waktu, dan faktor latar belakang keluarga.
2. Faktor internal, yang meliputi: faktor pertimbangan untung rugi, faktor nilai-nilai pribadi, faktor empati agama, suasana hati, faktor sifat, faktor tanggung jawab, faktor agama, tahapan moral, orientasi seksual, dan jenis kelamin.
3. Faktor penerima bantuan, yang meliputi: karakter orang yang memerlukan pertolongan, asal daerah, daya tarik fisik.
4. Faktor budaya, meliputi: nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat khususnya norma tanggung jawab sosial, norma timbal balik dan norma keadilan.

E. Tinjauan Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, *organon* yang berarti “alat”. Kata ini masuk ke bahasa latin, menjadi *organizatio* dan kemudian ke bahasa Prancis menjadi *organisation*. Organisasi menurut Mooney dalam Wursanto (2005:52)

adalah bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.. Sedangkan menurut Siagian dalam Wursanto (2005:53), organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki di mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Organisasi menurut Millet dalam Syafiie (2006:51) adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama.

2. Ciri-Ciri dan Unsur Organisasi

Ciri-ciri organisasi menurut Wursanto (2005:28), yaitu:

- a. Mempunyai struktur yang jelas.
- b. Batas-batas wewenang sudah jelas.
- c. Saluran hubungan kerja berlangsung.
- d. Adanya uraian tugas yang jelas dari setiap anggota organisasi.
- e. Jenjang kepangkatan sudah diatur dengan jelas.
- f. Tujuan organisasi dinyatakan dengan tegas.
- g. Keanggotaan organisasi diperoleh dengan sadar dan pada umumnya bersifat terbuka.

- h. Organisasi tidak mudah bubar, sehingga tahan lama.

Unsur-unsur organisasi menurut Wursanto (2005:54) terdiri dari:

- a. *Man* (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel.
- b. Kerjasama, suatu perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Tujuan bersama, arah atau sasaran yang ingin dicapai.
- d. Peralatan (*equipment*), peralatan atau *equipment* yang terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya.
- e. Lingkungan (*environment*), tempat atau lokasi yang sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan organisasi.
- f. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca (geografi, hidrologi, geologi, klimatologi), flora dan fauna.
- g. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.

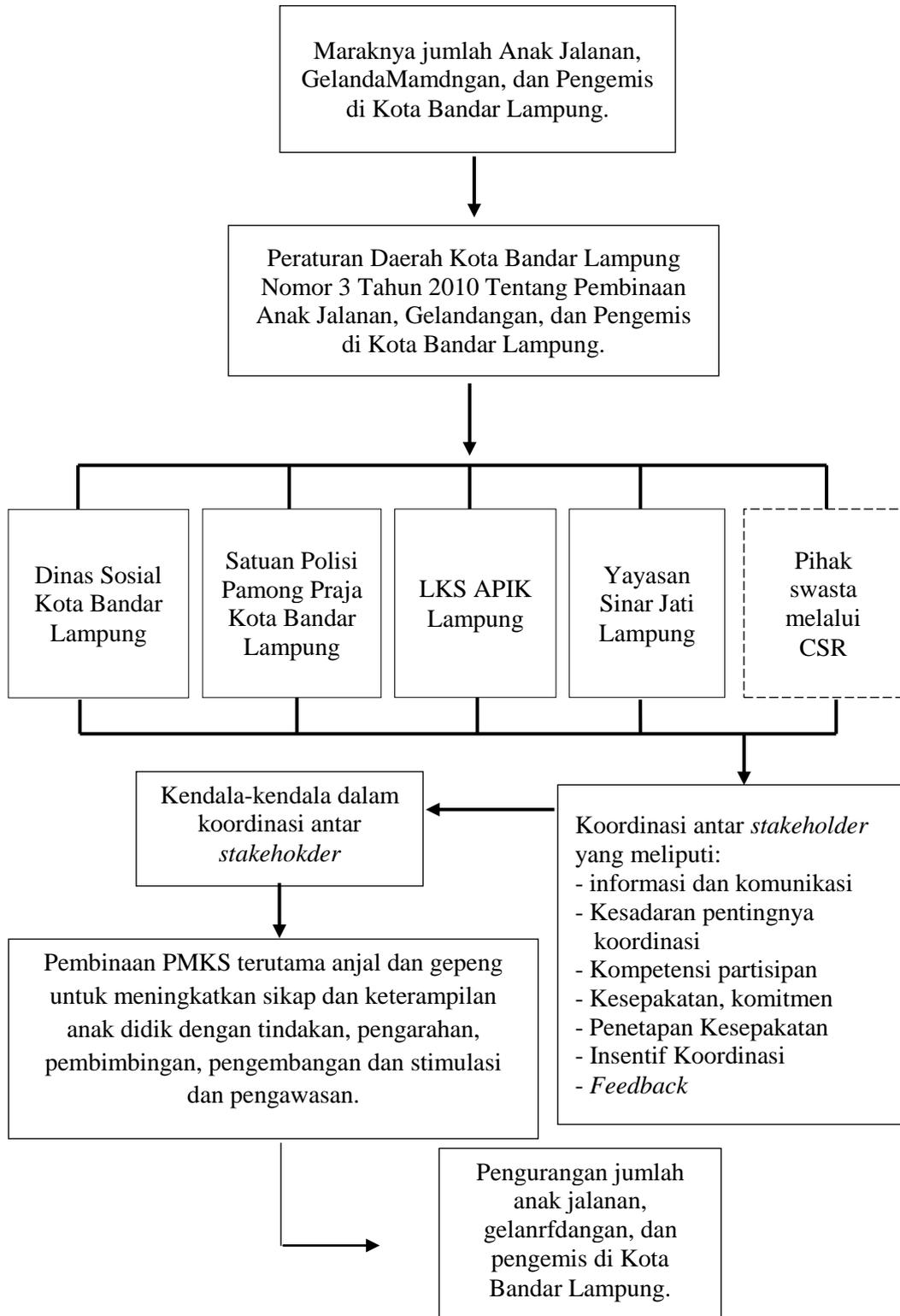
F. Kerangka Pikir

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat di negara manapun. Salah satu permasalahan yang timbul akibat adanya kemiskinan adalah adanya PMKS terutama Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Berdasarkan data yang dimiliki jumlah PMKS semakin meningkat khususnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Bandar Lampung. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan kebijakan

untuk mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung. Peraturan tersebut berisi segala bentuk usaha pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta larangan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk melakukan kegiatan di tempat umum dan jalanan. Pada Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa “Usaha pembinaan sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

Maraknya jumlah PMKS terutama anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Bandar Lampung harus diatasi dengan penanganan yang serius dari berbagai organisasi-organisasi publik yang biasa disebut *stakeholder*. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam hal ini meliputi: Satuan Polisi Pamong Praja, LKS Amanah Pendidik Insan Kamil (APIK), dan Yayasan Sinar Jati Lampung. Koordinasi antar *stakeholder* sangat menentukan keberhasilan dalam menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung. Maka dari itu, peneliti menggunakan indikator koordinasi menurut Ndraha untuk melihat bagaimana koordinasi antar *stakeholder* yang meliputi informasi, komunikasi, dan teknologi informasi; kesadaran pentingnya koordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan; komitmen; insentif koordinasi; *feedback*; dan juga kendala koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan PMKS terutama anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Gambar 1. Kerangka Pikir Koordinasi Antar Stakeholder dalam Pelaksanaan Pembinaan PMKS Terutama Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung



Sumber: Diolah oleh peneliti tahun (2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2011:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Moleong (2011:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti telah menemukan, memahami dan menjelaskan tentang Koordinasi Antar Stakeholder dalam Pembinaan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Moleong (2011:94) menyatakan bahwa penentuan fokus penelitian memiliki dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung. Peneliti telah menggunakan teori milik Ndraha (2015:297), dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen koordinasi yang dapat diukur melalui indikator:
 - a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
Penelitian ini melihat bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi informasi yang terjalin antar *stakeholder* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung.
 - b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
Koordinasi *built-in* di dalam setiap *job* atau *task* antar *stakeholder* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung.

c. Kompetensi Partisipan

Peserta koordinasi yang berkompeten mengambil keputusan dalam proses penanganan anjal dan gepeng.

d. Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dan komitmen yang harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal) antar *stakeholder* dalam proses penanganan anjal dan gepeng di Bandar Lampung.

e. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi

Penetapan kesepakatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkoordinasi antar *stakeholder* dalam proses penanganan anjal dan gepeng di Bandar Lampung

f. Insentif koordinasi

Yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama yang terjadi dalam proses penanganan anjal dan gepeng di Kota Bandar Lampung, dimana sanksi tersebut berasal dari pihak atasan yang terkait.

g. *Feedback* sebagai masukan-balik kedalam proses koordinasi selanjutnya

2. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung .

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*).

Penelitian ini dilakukan pada instansi yang terkait dalam koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan PMKS terutama anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yaitu di Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga-lembaga Sosial di Kota Bandar Lampung seperti Yayasan Sinar Jati. Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian, dikarenakan instansi-instansi tersebut merupakan organisasi publik yang melaksanakan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) terutama anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofl dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun kepada informan. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara

dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3. Data informan

No	Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Muzarin Daud	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	4 Mei 2017
2.	Dian Eka Darna	Ketua LKS APIK Lampung	18 Mei 2017
3.	Dimas Tangguh	Kepala LKS Gepeng Yayasan Sinar Jati Lampung	4 Mei 2017
4.	Adi Wibowo	Sekretaris Yayasan Sinar Jati	3 Mei 2017
5.	Jan Roma	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kota Bandar Lampung	15 Mei 2017
6.	Abdul Hamid	Anjal dan Gepeng	5 Mei 2017

Sumber: *Diolah Peneliti (2017)*

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder yang berkenaan dengan penelitian ini seperti karta tulis, peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan, literatur, artikel, koran dan yang berkenaan dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Dokumen Penelitian

No.	Dokumentasi	Substansi
1.	profil Yayasan Sinar Jati Provinsi Lampung	Berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, program-program, dan deskripsi tugas Yayasan Sinar jati
2.	Profil LKS APIK Provinsi Lampung	Berisi tentang sejarah berdirinya LKS APIK Lampung, visi dan misi, serta struktur organisasi
3.	Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Berisi sejarah singkat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi
4.	Peraturan Perundang-undangan	1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung 2. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5.	Dokumen Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Berisi tentang jumlah PMKS tahun 2015
6.	Dokumen Dinas Sosial Provinsi Lampung	Berisi tentang jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tahun 2010-2015
7.	Dokumen Yayasan Sinar Jati Lampung	Berisi tentang data gelandang dan pengemis yang direhabilitasi dan dibina
8.	Dokumen	1. . Foto-foto hasil observasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis 2. Foto-foto pembinaan anak jalanan di LKS APIK 3. Foto-foto pembinaan Gelandang Pengemis di Yayasan Sinar Jati 4. Foto-foto daftar gepeng di Yayasan Sinar Jati

Sumber: *Diolah Peneliti* (2017)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada proses ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang

berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Yayasan Sinar Jati Provinsi Lampung, LKS Amanah Pendidik Insan Kamil (APIK) Lampung. Wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan Koordinasi Antar *Stakeholder* dalam Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung.

2. Teknik Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian di Kota Bandar Lampung, Yayasan Sinar Jati Provinsi Lampung, LKS APIK Provinsi Lampung,

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian mengenai koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung antara lain Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, dokumen Dinas Sosial Kota Bandar

Lampung yang berisi jumlah PMKS tahun 2015, Profil Yayasan Sinar Jati Provinsi Lampung, Profil LKS APIK Provinsi Lampung, Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dokumen Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta dokumen berupa foto-foto pembinaan anak jalanan di LKS APIK Provinsi Lampung, foto-foto gelandang pengemis di Yayasan Sinar Jati, dan foto-foto daftar gelandang pengemis di Yayasan Sinar Jati Provinsi Lampung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkung, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, peneliti telah memilah-milah data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian Koordinasi Antar *Stakeholder* dalam Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung. Kemudian peneliti telah memisahkan data yang benar-benar berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar. Penyajian data telah dilakukan dengan mendeskripsikan atau merapikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami tentang Koordinasi Antar Stakeholder dalam Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada mulanya kesimpulan tersebut tentunya sangat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi yang terus dilakukan selama penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan penarikan kesimpulan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan mengenai sebuah analisis koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung.

G. Teknik Keabsahan data

Menurut Moleong (2011:324), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 4 (empat) kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data itu. Triangulasi dianggap sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari

berbagai pandangan. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memeriksa temuan di lapangan dengan membandingkannya berbagai sumber, metode, dan teori yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini dilakukan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti telah melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan penelitian.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses penelitian. Peneliti perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya.

4. Kepastian Data (*Confirmability*)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tapi hasilnya ada. Pemeriksaan telah dilakukan oleh pembimbing skripsi menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

Pembangunan kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam rangka menetapkan tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung, diperlukan visi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang disepakati bersama dan sbagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh *stakeholders*) dalam menetapkan peran masing-masing dalam membangun Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Kota Bandar Lampung (www.bandarlampung.go.id diakses pada 31 Juli 2017). Guna menyelaraskan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komperatif ataupun secara kompetitif, maka ditetapkanlah Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu: **“Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, dan Modern”**.

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan program prioritas dalam mengalokasikan sumber daya daerah, maka ditetapkanlah Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung (*www.bandarlampung.go.id diakses pada 31 Juli 2017*) sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Jasa, Perdagangan, Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Pengurus Iptek dan Nilai-Nilai Ketaqwaan, Perkembangan Kreatifitas Seni dan Budaya serta Peningkatan Prestasi Olahraga.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional, Berorientasi Kewirausahaan dan Bertata Kelola yang Baik.
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
6. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dengan mengedepankan Penataan Wilayah, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Wisata yang Maju dan Modern.

2. Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah keadaan sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,

air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial politik. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena Provinsi Lampung merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak masyarakat dari luar Kota Bandar Lampung yang mencoba peruntungan di kota. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Bandar Lampung, pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak disertai dengan tingkat kesejahteraan yang baik menyebabkan banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Garis kemiskinan Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 mencapai 100 ribu jiwa dengan presentase 10,33. Berdasarkan presentase kemiskinan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Bandar Lampung bukan yang tertinggi, namun sebagai daerah ibukota angka presentase kemiskinan cukup memprihatinkan. Berikut data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial termasuk jumlah fakir miskin di Kota Bandar Lampung yang mencapai 54.251 pada tahun 2015.

Tabel 5. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung Tahun 2015

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Anak Terlantar	1.229
2.	Lansia Terlantar	1.903
3.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	616

4.	Anak Jalanan	72
5.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	11
6.	Korban Narkoba	61
7.	Penyandang Cacat	1.034
8.	Gelandang dan Pengemis	117
9.	Tuna Susila	33
10.	Bekas Warga Binaan	132
11.	Fakir Miskin	54.251
12.	Pemulung	257
	Jumlah	59.716

Sumber: <https://bandarlampungkota.bps.go.id> diakses pada 31 Juli 2017

3. Kondisi Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, anak jalanan adalah seorang anak yang menghabiskan sebagian waktunya di jalanan. Yaitu seseorang, baik laki-laki maupun perempuan berusia 5-18 tahun yang berada di jalanan minimal 4 jam/ hari dalam kurun waktunya 1 bulan yang lalu. Ciri yang melekat pada anak jalanan antara lain: melakukan kegiatan tidak menentu dan berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya, mencari nafkah dengan menjadi pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan pasar, bersekolah maupun tidak bersekolah, suka mengganggu ketertiban umum, keluarganya tidak mampu, melarikan diri dari rumah, tidur di tempat umum dan lain sebagainya.

Sedangkan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang ataupun barang.

Umumnya mereka menyebar keseluruh bagian Kota Bandar Lampung seperti di lampu merah, pasar, maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Berdasarkan observasi peneliti, tempat yang sering digunakan untuk para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis beraktivitas seperti di lampu merah Pramuka, lampu merah Unila, Pasar Bambu Kuning, Pasar Tengah dan tempat keramaian lainnya yang belum terjangkau peneliti.

Kota Bandar Lampung termasuk kedalam kota yang belum tuntas dalam menelaraskan kesejahteraan masyarakatnya, dilihat masih terdapat keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang masih beroperasi di setiap sudut keramaian di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung

Tabel 6. Data Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jumlah
1.	2010	207 orang
2.	2011	188 orang
3.	2012	191 orang
4.	2013	153 orang
5.	2014	181 orang
6.	2015	181 orang

Sumber: *Data Dinas Sosial Provinsi Lampung (2016)*

Dari jumlah data diatas menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mengalami penurunan pada tahun 2011 berjumlah 188 orang, kemudian pada tahun 2012 Dinas Sosial Provinsi Lampung mencatat jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mengalami kenaikan menjadi 191 orang, kemudian hingga tahun 2015 keberadaan anak jalanan, gelandangan,

dan pengemis berjumlah 181 orang. Meskipun mengalami penurunan, namun keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tersebut masih tetap ada hingga saat ini.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Pembentukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung, telah berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan Perda tersebut, diatur rincian tugas masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 24 tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Dengan adanya Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung kemudian mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah: “Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat”.

Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud:

1. Meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
2. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
3. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.

4. Terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Letak Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sangat strategis yaitu terletak di Jl. Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat, yang termasuk jalan protokol.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terdiri dari:

a) Kepala Dinas

b) Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan

c) Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Kemitraan
2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan

d) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial

penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban narkoba. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan teknis kebijaksanaan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
2. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
3. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksanaan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
4. Penyelenggaraan pelatihan sosial dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
5. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dibantu oleh:

1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Rehabilitasi Penyandang Cacat,

mempunyai tugas:

- a. Meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak agar hak-hak anak terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat terjamin
- b. Mencegah dan menghindari anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah sosial anak dilingkungannya.
- d. Melindungi dan menjamin hak-hak penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan pemberian kemudahan dalam akses fasilitas pelayanan publik dan pelayanan sosial.
- e. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.
- f. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat melalui bimbingan sosial dan keterampilan kerja serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pengembangan budaya kewirausahaan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial, mempunyai tugas:

- a. Meningkatkan fungsi sosial para tuna sosial terhadap gelandangan, pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandangan psykotik, waria,

dan bekas anak negara agar dapat hidup dan dapat mencari nafkah sesuai dengan norma sosial masyarakat Indonesia melalui bimbingan sosial dan keterampilan kerja serta bantuan ekonomis produktif.

b. Memberikan pelayanan sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS agar tetap dapat hidup produktif serta mengurangi beban sosial psikologis yang dialaminya.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba, mempunyai tugas:

a. Memulihkan fungsi sosial korban penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan bimbingan sosial, keterampilan kerja dan bantuan ekonomis produktif.

b. Meningkatkan ketahanan dan daya tingkat masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.

4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

2. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan

3. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

5. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :

1. Seksi Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

2. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

3. Seksi Kesejahteraan Keagamaan

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar

Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor

1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b) Pelaksana kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Sipil Daerah, dan atau aparaturnya lainnya.
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya daerah atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- g) Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satpol PP
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Searah dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menyusun visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya situasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang kondusif serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya.

b. Misi

- 1) Mendukung kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya dan pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kapasitas organisasi dan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme pelaksanaan tugas.
- 3) Membangun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas operasional Polisi Pamong Praja.

D. Gambaran Umum LKS Amanah Pendidik Insan Kamil (APIK) Lampung**1. Profil LKS APIK Lampung**

LKS APIK Lampung adalah sebuah lembaga sosial yang menangani anak-anak yang bekerja di jalanan. Yayasan ini berdiri sejak tahun 2003. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada anak-anak yang beraktifitas ekonomi di jalan dan anak-anak yang mengalami keterlantaran. Selter pertama LKS APIK berada di Jalan Raden Intan Gg. Pelita Nomor 10. Berada di pusat jantung kota Bandar Lampung. Sedangkan alamat sekretaris LKS APIK berada di Jalan Mayjend Sutyoso Nomor 5 Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Konsep pemberdayaan dan pelayanan yang diberikan adalah memastikan anak-anak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak anak serta pemberdayaan bagi keluarga.

2. Visi dan Misi LKS APIK Lampung

Visi LKS APIK Lampung adalah “Menjadi organisasi sosial yang mandiri, profesional, dan terdepan dalam pelayanan dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial bagi anak Indonesia guna membuka harapan dan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa”.

Sedangkan Misi LKS APIK Lampung adalah “Memberikan santunan, pendidikan serta pelajaran berdasarkan ajaran agama Islam secara Cuma-Cuma kepada anak jalanan, anak terlantar, anak yatim piatu, anak-anak dalam perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnya agar mereka dikemudian hari dapat berdiri sendiri, serta dapat mencari mata pencaharian dan penghidupan sendiri sehingga menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara”.

3. Maksud dan Tujuan LKS APIK Lampung

Maksud dari LKS APIK adalah memberikan pelayanan sosial terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak yatim piatu, anak-anak dalam perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnya serta melindungi dan mengembalikan anak-anak tersebut kepada kehidupan yang normatif dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam kehidupan di masyarakat.

Sedangkan tujuan dari LKS APIK adalah:

- a) Membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan, anak terlantar, anak, anak dalam perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnya yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

- b) Mengupayakan anak-anak yang bermasalah untuk kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
- c) Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak yang bermasalah tersebut dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.
- d) Menginformasikan keberadaan anak-anak tersebut dan keluarganya pada khususnya serta penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya membantu kesulitan hidup agar dapat menata masa depan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup anak, keluarga, serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
- e) Mendorong kepedulian masyarakat terhadap usaha pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, mental, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

4. Struktur Organisasi

LKS APIK di dukung 10 orang. Berikut adalah kepengurusan LKS APIK:

- a) Dewan Penasehat : DR. Netty Yuliana S.P., M.Si
- b) Drs. Samsudin M.Si : (Pendiri Yayasan YAPIM)
- c) Dewan Pendiri : 1. Asri Djali (Purnawirawan POLRI)
2. Ir. Patriot Yuliansyah, M.M (PNS)
3. Ferry Desmawan, S.T.P (PNS)
4. Agus Purnomo, S.Si (Guru SMP Al Azhar)
5. Abrar Adzka, S.Pd (Guru SMP Pringsewu)
- d) Ketua Yayasan : Ferry Desmawan, S.T.P

- e) Ketua Harian : Dian Eka Darma W. A.Md
- f) Nama Pengurus : 1. Penny Otavianty, S.P
2. Titin Andriyani, S.T.P
3. Vitri Widiastuti, S.P
4. Maria Ulfa, A.Md
5. Rina, S.Pdi

LKS APIK memiliki wilayah binaan di 18 Kecamatan yakni kecamatan Kedaton, Kemiling, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Wayhalim, Tanjung Senang, Labuhan Ratu, Bumi Waras, Lampung Timur, Lampung Selatan. Wilayah binaan LKS APIK untuk program gepeng yakni Kecamatan Sukarame, Teluk Betung Barat dan Selatan serta Kecamatan Bumi Waras.

E. Gambaran Umum Yayasan Sinar Jati Lampung

1. Sejarah Singkat Yayasan Sinar Jati Lampung

Yayasan Sinar Jati Lampung merupakan wadah atau tempat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Yayasan Sinar Jati Lampung telah dirintis sejak tahun 1992 yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, namun belum berbadan hukum. Pada tahun 2000 mulai didaftarkan dan disyahkan sebagai lembaga yang berbadan hukum yang bernama “Yayasan Sinar Jati” dengan Akte Notaris Nomor 18 tanggal 3 Maret 2000 yang berlokasi di jalan marga Nomor 14/200 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

2. Tujuan Yayasan Sinar Jati Lampung

Adapun tujuan dari didirikannya Yayasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan, penyadaran, dan kepercayaan diri agar dapat berperan aktif akan fungsi diri dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.
- b. Meningkatkan gairah dan kenikmatan hidup yang dapat membangun potensi diri dalam menghadapi segala bentuk persoalan yang selalu beriringan dengan waktu.
- c. Membantu klien untuk bisa mandiri dengan pengkaryaan dan ketrampilan sehingga menjadi manusia yang berdaya guna.

3. Visi dan Misi Yayasan Sinar Jati Lampung

Adapun Visi dari Yayasan Sinar Jati Lampung adalah “Berkhidmat untuk kesejahteraan umat”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dibentuklah misi sebagai berikut:

- a. Membimbing klien agar menyadari segala permasalahannya
- b. Membantu dan membimbing klien dalam perilaku, keyakinan dan harga diri
- c. Membangun klien agar dapat bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat

Adapun PMKS yang ditangani sistem panti maupun diluar panti yaitu:

- a. LKS Bina Laras : menangani masalah penderita psikotik
- b. LKS Primadi Putra : menangani masalah korban Napza
- c. LKS Welas Asih : menangani masalah Lansia/jompo terlantar

- d. LKS Nur Qolbu : menangani masalah anak jalanan dan anak terlantar
- e. LKS Gepeng : menangani masalah gelandangan dan pengemis

4. Struktur Organisasi

Yayasan Sinar Jati didukung 34 orang (11 Sarjana, 1 Diploma, 5 Lulusan SLTA,).

Berikut adalah kepengurusan Yayasan Sinar Jati:

- a) Ketua Yayasan : Hi. Sukri Atmojo, S.E
- b) Program Manager : Imam Bagoes S, S.IP
- c) Sekretaris : Hi. Adi Wibowo
- d) Bendahara Umum : Hj. Tutwuri H.
- e) LKS Primadi Putra : Hi. Sukri Atmojo, S.E
- f) LKS Bina Laras : Imam Bagoes S, S.IP
- g) LKS Welas Asih : Hj. Fatimah Edy
- h) LKS Nur Qolbu : A. Faizzudin, S.Pd
- i) LKS Gepeng : Dimas Tanggung, S.IP
- j) Pekerja Sosial :
 1. Drs. Mujadi
 2. Rizki Argiyansyah, SST
 3. Bella Pangestu, SST
- k) Konselor :
 1. Dimas Tanggung, S.IP
 2. Dedi Suhendra, A.Mk
 3. Sari Ambar Arum, S.Pd
 4. Nurbaiti
 5. Rostina, S.E

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung, maka penulis memberikan simpulan bahwa:

a Koordinasi yang dilakukan antar stakeholder belum dijalankan dengan baik.

Hal tersebut bisa dilihat dari tujuh indikator koordinasi, yaitu:

1) Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Informasi

Pemberian informasi yang diberikan masing-masing instansi kepada instansi lain sudah jelas dan juga komunikasi yang dijalankan oleh antar instansi sudah berjalan dengan baik dan juga untuk penggunaan teknologi informasi sudah digunakan dengan baik.

2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam koordinasi ini belum cukup baik, hal ini dikarenakan rapat atau forum jarang dilakukan oleh para *stakeholder*.

3) Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan dalam melakukan koordinasi ini dari masing-masing instansi secara prosedur belum cukup baik.

4) Kesepakatan dan Komitmen

Kesepakatan dan komitmen dalam berkoordinasi sudah ada. Kesepakatan dan komitmen dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2008

5) Penetapan Kesepakatan

Penetapan kesepakatan sudah berjalan dengan baik karena adanya kesepakatan secara tertulis yang dibuat oleh masing-masing instansi dalam hal koordinasi pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

6) Insentif Koordinasi

Insentif yang diberikan dalam koordinasi ini belum ada, karena tidak ada *reward* dan sanksi tidak diatur dalam kesepakatan tertulis.

7) *Feedback*

Feedback yang dirasakan dalam koordinasi ini belum cukup baik.

b. Kendala-kendala yang dihadapi koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung

1) Rapat evaluasi koordinasi yang jarang dilakukan

Rapat evaluasi sangat penting untuk mengetahui koordinasi yang dijalankan selama ini, namun rapat tersebut sudah jarang dilakukan sehingga tidak memiliki rencana kerja yang baik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait koordinasi antar *stakeholder* dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran masing-masing pelaksana koordinasi harus ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku koordinasi untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani anjal dan gepeng di Kota Bandar Lampung.
- 2) Jadwal rapat atau forum koordinasi dibuat dengan teratur agar dapat dilaksanakan dengan baik.
- 3) Perlu diterapkannya sistem reward dan punishment agar para pelaku koordinasi semakin taat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badrudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Bartal. 1976. *Pembinaan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Handayadiningrat, Soewarno. 1986. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Hasibuan, Melayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayat, S. 1979. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.

Moekijat. 2006. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Wursanto, Ignasius. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Skripsi dan Jurnal

Munawaroh, Kholifatul. 2016. *Koordinasi Multistakeholder dalam Proses Rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur (Studi Tentang Koordinasi Multistakeholder di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Saharuddin dan Siska Oktavia. 2013, '*Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor*, vol. 01, no.03, hal 233, diakses pada Sabtu, 29 Juli 2017 pukul 20.45 WIB <http://journal.ipb.ac.id/>

Selviyanna, Irma Selly. 2012. *Interelasi Multistakeholder dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bidang Pengembangan Usaha Makro Dan Menengah. (Studi pada PT.Perkebunan Nusantara VII)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Susi Hendriani dan soni Nulhaqim.2008. *Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT. (Perseroan) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai*. Jurnal Kependudukan Padjajaran, vol. 01, no.02, hal 152-168, diakses pada Sabtu, 29 Juli 2017 pukul 21.00 WIB

Website

<http://bps.go.id>, diakses tanggal 28 Desember 2016

<http://bandarlampungkota.bps.go.id>, diakses tanggal 10 November 2016

<http://bandarlampung.go.id>, diakses pada tanggal 31 Juli 2017

<http://radarlampung.co.id>, diakses tanggal 28 Desember 2016

<http://saibumi.com>, diakses tanggal 10 November 2016